
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2022

Desi Fitriana Sari¹⁾, Amy Wulandari²⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana ³⁾, Nur Asih Tri Atmaja⁴⁾,
Arrin Sulistiyowati⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis , Universitas Boyolali
Jl. Pandanaran No.405 Boyolali

e-mail : pandufitri40@hmail.com¹⁾, amywulandari19@gmail.com²⁾, alean.kistiani@gmail.com³⁾,
nurasihtriatmaja@gmail.com⁴⁾, Arrinsulistiyowati@gmail.com⁵⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota provinsi jawa tengah periode 2018 – 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi yang diperoleh melalui BPS Provinsi Jawa tengah. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan total 175 sampel dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian uji hipotesis atau uji (t) menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yakni sebesar $0,000 < 0,05$ dan $0,034 < 0,05$. Sementara Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan karena $0,273 > 0,05$. Koefisiensi Determinasi sebesar 0,106 atau setara dengan 10,6 % yang berarti variabel independen mampu menjelaskan sebesar 10,6 % variabilitas dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mampu memberikan wawasan penting bagi pembaca tentang faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue, capital expenditure, and balancing funds on the financial performance of local governments in districts/cities in Central Java province for the period 2018-2022. The research method used is quantitative with data collection through documentation obtained through the Central Java Province Statistics Agency (BPS). The sample used is a saturated sample with a total of 175 samples in this study. Data analysis was carried out using SPSS version 26. The results of the hypothesis test or t-test show that PAD and Capital Expenditure have a significant effect on the financial performance of local governments, namely $0.000 < 0.05$ and $0.034 < 0.05$. While the Balancing Fund does not have a significant effect because $0.273 > 0.05$. The Determination Coefficient is 0.106 or equivalent to 10.6%, which means that the independent variable is able to explain 10.6% of the variability in local government financial performance. This study is able to provide important insights for readers about what factors influence Local Government Financial Performance.

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, Balancing Funds, Financial Performance.

1. Pendahuluan

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tolak ukur maupun ukuran seberapa baik pemerintah melaksanakan dan mengelola keuangan secara efektif sepanjang waktu. Tujuan

kinerja keuangan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan komunikasi kelembagaan (Clarissa Sukmaning Ati dkk, 2023). Jawa Tengah merupakan provinsi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dimana setiap kabupaten/kota diberikan wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan diberikan kewenangan tersebut tentunya pemerintah berharap supaya kabupaten/kota dapat menggali potensi daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan tugas serta kewenangan pemerintahan daerah diharapkan mampu memperoleh sumber-sumber keuangan terkhususnya guna melengkapi keperluan pemerintah dan pembangunan daerahnya. PAD merupakan sumber paling utama dalam pembiayaan serta pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari hasil perolehan pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, perolehan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain, serta pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menyajikan peran penting untuk daerah sebab nantinya bisa mampu diterapkan untuk melaksanakan roda pemerintahan guna memfasilitasi kesejahteraan masyarakatnya (Sari dan Mustanda, 2019).

Berikut adalah tabel PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 1

Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2018 – 2022 (Rupiah)

Tahun	Total PAD Kabupaten/Kota	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	13.000.764.949,00	(7 %)
2019	13.213.005.049,00	2%
2020	13.396.874.302,00	1%
2021	16.548.307.738,00	24%
2022	16.477.980.392,00	-3 %

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah & diolah, 2024

Berlandaskan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun. Dari tahun 2018 yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7 %, kemudian dari tahun 2018 ke 2019 naik sebesar 2 %, tahun 2019 menuju tahun 2020 naik sebesar 1 %, tahun 2020 menuju tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 24 %, dan 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 3 %. Menurut Penelitian dari Husnun Karima dkk (2020), mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah hal ini disebabkan karena lebih baik realisasi pendapatan asli daerahnya, maka semakin baik pula Kinerja Keuangan Pemerintahannya. Berbanding terbalik dengan penelitian dari Fatimah dkk (2024) adanya pengaruh negatif PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan dikarenakan Pendapatan Asli Daerah kian tinggi tetapi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah perlahan menurun.

Disamping PAD, Belanja Daerah termasuk berpengaruh juga terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sebab sangat berhubungan erat dengan mutu pelayanan umum yang nantinya akan diserahkan daerah untuk masyarakatnya. Belanja yang sudah dieksekusi oleh pemerintah berguna untuk kebijakan ekonomi yang kedepannya akan memengaruhi pada perekonomian daerah, belanja daerah terdiri dari beberapa bagian salah satunya yakni belanja modal. Berikut adalah Tabel Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2022.

Tabel 1. 2

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2018 – 2022 (Rupiah)

Tahun	Total Belanja Modal Kabupaten/Kota	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	12.815.872.197,00	(9 %)
2019	13.414.868.119,00	5 %
2020	11.682.006.188,00	(13 %)
2021	9.929.104.403,00	(15 %)
2022	10.226.091.988,00	3 %

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah & diolah , 2024

Dari Tabel tersebut,dapat dijabarkan bahwasannya Belanja modal juga mengalami fluktuasi, terdapat ketidakseimbangan pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2022. Dari tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar 9 % dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2018 ke 2019 naik sebesar 5 %, tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 13 %, dan terjadi penurunan kembali dari tahun 2020 ke 2021, kemudian mengalami peningkatan sebesar 3 % dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Berdasarkan penelitian dari Clarissa dkk (2023) memaparkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dikarenakan semakin baik belanja modalnya maka lebih baik pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Namun dari penelitian Novita Natalia (2023) belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah sebab belanja modal didalam penelitian ini adalah sebagai investasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Terjadinya Fluktuasi yang terdapat pada Belanja Modal juga dipengaruhi dari Dana Perimbangan,dimana Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dan diberikan untuk daerah guna memfasilitasi keperluan daerah dalam rangka desentralisasi. Dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, juga memperhatikan potensi, keadaan, dan keperluan daerah, serta besaran pendanaan pelaksanaan (UU No. 33/2004). Berikut adalah tabel Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 3

Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Jawa tengah 2018 – 2022 (Rupiah)

Tahun	Total Dana Perimbangan Kabupaten/Kota	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	44.206.414.321,00	(1%)
2019	46.251.492.906,00	5 %
2020	48.656.598.893,00	5 %
2021	55.167.590.617,00	13 %
2022	56.871.891.327,00	3%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah & diolah, 2024

Berdasarkan Tabel diatas,terdapat kenaikan selama 4 tahun terakhir, dan penurunan di tahun 2018. Dari periode 2018 turun sebesar 1 % dari tahun 2017, mengalami kenaikan sebanyak 5 % dari tahun 2018 ke 2019, dan kenaikan yang sama sebesar 5 % dari tahun 2019 ke 2020, kemudian dari tahun 2020 ke 2021 naik sebesar 13 %, kemudian terjadi peningkatan lagi dari tahun 2021 ke 2022. Berdasarkan penelitian dari Wendi Suprpto (2023) menjelaskan jika Dana Perimbangan berpengaruh positif pada Kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan semakin naik dana perimbangannya maka lebih baik pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Tetapi dari penelitian Ester Triyona (2021) berpendapat bahwa tidak adanya pengaruh dari dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan dana perimbangan hanya memperkecil kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota provinsi jawa tengah periode 2018 – 2022.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori *Stewardship*

James David (1997) memaparkan bahwasannya teori *Stewardship* menggambarkan hubungan yang erat antara dua pihak *principal*/pemilik dan juga *steward*, yaitu manajer. Salah satu variabel keberhasilan dari hubungan ini adalah terciptanya organisasi kuat pada segi ekonomi. Menurut David, teori ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kesuksesan dan kemantapan organisasi. Penelitian disini mengaitkan teori *Stewardship* dengan peran pemerintah selaku *steward* serta masyarakat sebagai *principal*, di mana pemerintah diberikan *able e* oleh masyarakat untuk menyediakan layanan yang optimal dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemberdayaan daerah meliputi berbagai acara, termasuk perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (2) PP No. 12 Thn 2019 terkait pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan dan integrasi efektif oleh kegiatan – kegiatan tersebut sangat penting untuk mencapai pemberdayaan keuangan daerah yang optimal. Pemberdayaan keuangan baik diyakini bisa berkontribusi pada kesejahteraan financial daerah secara keseluruhan. Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dinilai melalui kinerja keuangannya, yang merupakan indikator utama kesehatan fiskal daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Perolehan suatu daerah yaitu elemen kunci berperan aktif dalam mendorong pembangunan infrastruktur daerah dan menambah kesejahteraan masyarakat setempat. Keahlian daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang signifikan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan daerah (Mahmudi, 2019). Sumber-sumber pendapatan ini diatur oleh peraturan daerah dan berkontribusi pada total pendapatan daerah.

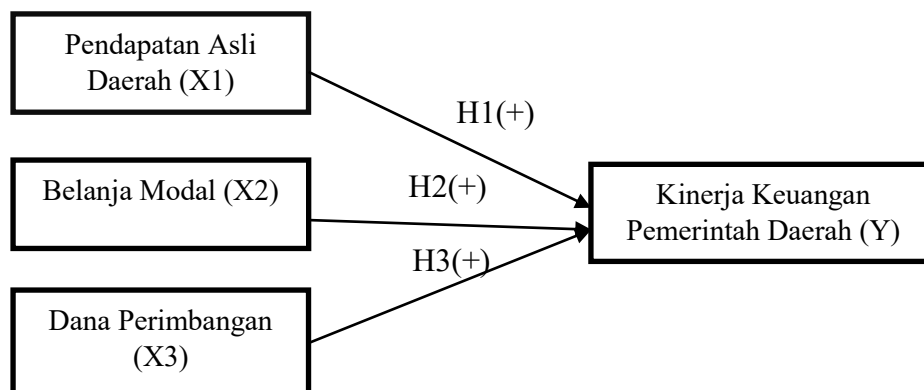
2.4 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja daerah yang digunakan sebagai satu faktor pengelolaan anggaran oleh pemerintah. Ini bertujuan mendukung eksekusi dalam wewenang pemerintah dan meningkatkan fasilitas umum. Sumber – sumber belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal aset tetap lainnya.

2.5 Dana Perimbangan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di UU No 33. Dana Perimbangan merupakan dana perolehan APBN kemudian disalurkan ke daerah guna memfasilitasi keperluan daerah di kegiatan desentralisasi. Maksud dari Dana Perimbangan yakni mengatasi disparitas fiskal antar pemerintah dari pusat dengan pemerintah dari daerah. Sistem perimbangan diantara pemerintah dari pusat dengan daerah diatur sebagai mekanisme bagian dana secara adil, proposional. Dalam konteks pembiayaan pelaksanaan desentralisasi, pertimbangan terhadap potensi, situasi, dan keperluan setiap daerah, serta besarnya pendanaan pelaksanaan , menjadi hal yang penting.

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

Variabel Dependen : Kinerja Keuangan (Y)

Variabel Independen : PAD (X1)

Belanja Modal (X2)

Dana Perimbangan (X3)

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif merupakan suatu pendekatan pada penelitian dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 – 2022.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 – 2022 yakni 35 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode Dokumentasi, dimana dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data sekunder melalui website bps provinsi jawa tengah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov signifikan pada Tabel 4.1 dengan nilai Sig. 0.688 > 0.05. dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	,714
Asymp. Sig. (2-tailed)	,688

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

2) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	P – Value
X1	,850
X2	,650
X3	,730

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Dari hasil perhitungan seperti pada tabel 3.2 menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi pada proses estimasi parameter model penduga, dimana sesuai kriteria awal bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas > 0,05. Karena semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 jadi tidak ada masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

3) Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 3

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
X1	,637	1,570
X2	,607	1,648
X3	,851	1,176

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Dari hasil perhitungan multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 (10%), hal ini berarti tidak ada korelasi antara variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada model regresi yang dipakai.

4) Uji Autokolerasi

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokolerasi

Durbin Watson	1,492
---------------	-------

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 1,492. Sehingga nilai Durbin Watson terletak diantara -2 +2. Maka menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Sig
X1	2,518	,000
X2	-2,303	,034
X3	3,830	,273

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Diperoleh persamaan linier

$$Y = -0,056 + 2,518 (X1) - 2,303 (X2) + 3,830 (X3) + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persamaan regresi linear berganda tersebut nilai β_0 (Konstanta) sebesar $-0,056$ dan mempunyai nilai negatif. Nilai tersebut berarti bahwa jika ketiga variabel bebas lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan sama dengan nol (0) atau konstan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar $-0,056$.
- b. Koefisiensi regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) = $2,518$. Nilai koefisien regresi PAD yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah artinya jika Pendapatan Asli Daerah naik, maka akan meningkat pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar $2,518$.
- c. Koefisiensi regresi Belanja Modal = $-2,303$. Nilai koefisien regresi belanja modal yang negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya jika Belanja Modal mengalami penurunan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga akan menurun sebesar $-2,303$.
- d. Koefisiensi regresi Dana Perimbangan = $3,830$, nilai koefisien regresi Dana Perimbangan yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang artinya jika Dana Perimbangan naik maka akan membaik pula kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar $3,830$.

4.3 Uji Hipotesis

1) Uji t

Tabel 4. 6

Hasil Uji t

Variabel	Sig
X1	,000
X2	,034
X3	,273

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) diperoleh hasil $0,000 < 0,05$ yang artinya PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian Belanja Modal (X2) sebesar $0,034 < 0,05$ yang berarti Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya Dana Perimbangan (X3) diperoleh hasil $0,273 > 0,05$ yang artinya Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Uji F

Tabel 4.7
Hasil Uji F

Variabel	Sig
X1	,000
X2	,034
X3	,273

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Hasil regresi dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan bersama – sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

4.4 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisiensi Determinan

Model	Adjusted R Square
1	,106

Sumber : Data Output SPSS yang diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil dari *adjusted* R^2 sebesar 0,106 atau 10,6 %. Sedangkan sisanya 89,6 % dipengaruhi pada variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sehingga H_1 diterima.
2. Uji signifikansi pada Belanja Modal diperoleh nilai sebesar 0,034 kurang dari 0,05 ($p < 0,05$), yang berarti belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sehingga H_2 diterima.
3. Uji signifikansi menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,273 lebih dari 0,05 ($p > 0,05$) berarti Dana Perimbangan secara parsial

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sehingga H₃ ditolak.

4. Berdasarkan hasil penelitian variabel PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan presentase pengaruh sebesar 10,6% sedangkan sisanya 89,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak masuk dalam penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan untuk menambah manfaat penelitian ini, maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah dan meminimalkan ketergantungan pusat, sehingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah khususnya mampu membiayai dan meningkatkan daerahnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen lainnya seperti Ukuran Pemerintah, Opini Audit yang dapat mempengaruhi instansi pemerintah yang bisa dilihat dari faktor internal maupun eksternal.
2. Diharapkan penelitian dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel lebih besar lagi dengan periode yang lebih panjang sehingga mampu memberikan hasil yang hampir mendekati kondisi yang sebenarnya.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antari, Ni Putu Gina Sukma, and Ida Bagus Panji Sedana.2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana.
- [2] Bilqis, Husnun Karina, and Nuwun Priyono.2023. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020*. Jurnal Ekonomika.
- [3] Ginting, Jefri Ananda, Henny Yulsiati, and Yevi Dwitayanti.2021. *TERhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021*.
- [4] Karlinda, Ai Elis, Putri Azizi, and Mardhatila Fitri Sopali.2021. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Prestasi Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pengembangan Karir Pada PT. PLN (Persero) Kota Padang Rayon Kuranji*. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
- [5] Maulina, Afia, Mustafa Alkamal, and Nabilla Salsa Fahira.2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,*

Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.

- [6] Padang, Novi Natalia, and Wendi Suprpto Padang.2023. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.* Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan.
- [7] Prastiwi, Nanda Dipa, and Andri Waskita Aji.2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha.
- [8] Sari, Ni Made Diah Permata, and I Ketut Mustanda.2019. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.* E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana.